



MONTHLY REPORT AGUSTUS 2006

BAB I PENDAHULUAN

Sudah 20 bulan lebih bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berlalu. Proses rehabilitasi dan rekonstruksipun masih terus berjalan. Berbagai pihak menilai bahwa perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi masih sangat lambat. Hal ini dibuktikan dari realisasi anggaran dan realisasi bangunan fisik yang ada.

Data dari Bagian Anggaran BRR Nad-Nias menyebutkan bahwa sampai dengan 11 Agustus 2006, realisasi penggunaan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh masih 32,4% yang berasal dari DIPA 2005, DIPA-L 2006, DIPA 2006, DIPA 2005&L, dan DIPA 2006&L untuk Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Kelembagaan, Perumahan, Infrastruktur, dan Koordinasi Tata Guna Lahan, Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha, Agama, Sosial, dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kesehatan, serta Sekretariat Perwakilan Nias, Keuangan, Kominfo. Ini sungguh menyedihkan, disaat dana yang sangat besar mengalir ke Aceh, namun dalam penggunaannya masih sangat minim. Tidak adanya penjelasan mengapa penyerapan dana ini sangat rendah tentu saja membuat seluruh elemen masyarakat menjadi bertanya-tanya. Apakah karena kesulitan pencairan dana? Ataupun karena kesulitan mendapatkan material? Ataupun karena sengaja diendapkan di rekening BRR? Wajar saja, kalau semua menduga-duga, hal ini terjadi tidak lain karena tidak adanya transparansi dari BRR sendiri sebagai penanggung jawab proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Selain itu, secara awam juga bisa dilihat bagaimana perkembangan pembangunan secara fisik yang terjadi. Mulai dari kebutuhan dasar perumahan penduduk yang sampai saat ini masih sedikit sekali. Sampai dengan Akhir Juli 2006, pembangunan perumahan baru mencapai 46.000 unit dari 120.000 unit kebutuhan yang ada. Belum lagi, sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Sampai dengan Agustus 2006, masih ada yang melakukan proses belajar mengajar di tenda. Bagaimana kita bisa



mendapatkan SDM yang handal apabila proses belajar mengajar masih dengan fasilitas minim seperti itu. Dan rasanya wajar juga apabila kita memprediksikan bahwa sebagian dari satu generasi kita mempunyai skill yang rendah karena keadaan seperti ini. Jika kita akumulasikan, berapa banyak SDM handal kita yang hilang sejak konflik terdahulu?. Kapan kita bisa bangkit kembali dengan lebih mengedepankan pembangunan manusia bukan hanya pembangunan fisik semata. Kemudian, jika kita melihat pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga masih sangat minim. Begitu sulitnya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus terutama bagi masyarakat miskin. Kartu Askeskin sebagai bantuan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang didistribusikan pun masih sangat minim yang hanya mencapai --- % saja. Pendistribusian kartu ini diperuntukkan untuk 2,01 juta masyarakat miskin dari 4,03 juta penduduk Aceh. (BPS, 2005)

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Aceh berkorelasi positif dengan peningkatan pengangguran di Aceh. Hal ini disebabkan karena sumber mata pencaharian ekonomi masyarakat yang hilang pasca tsunami yang merupakan akumulasi dari sulitnya mencari nafkah pada saat konflik dulu. Namun, jika dibandingkan dengan anggaran yang diperuntukkan kepada Aceh setiap tahunnya pasca UU NO. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dimana Prov. NAD mendapatkan DAU dalam jumlah yang besar setiap tahunnya, kita berharap bahwa penduduk miskin di Aceh bisa berkurang seiring dengan proses pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan fasilitas dasar bagi kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.



BAB II

PERUMAHAN DAN PERTANAHAN

Distribusi Bantuan Rumah

Bantuan nasional maupun internasional untuk korban tsunami ke Aceh yang melimpah ruah ternyata bukan jaminan rehabilitasi bisa berjalan mulus. Hingga memasuki setahun sembilan bulan pasca bencana, BRR belum punya data yang valid mengenai pengungsi. Mereka, tak punya data pasti mengenai jumlah rumah sebelum dan sesudah tsunami di tiap kampung sehingga tumpang tindih bantuan dan penggelembungan jumlah keluarga tidak bisa dihindari. Hampir di setiap desa bisa ditemui pengungsi yang mendapat bantuan rumah ganda, bahkan ada yang mendapat sembilan unit rumah, seperti di Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Di tempat lain, sebagian pengungsi masih ada yang belum mendapatkan satu rumah pun, seperti yang dialami oleh masyarakat Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang dijanjikan akan dibangun oleh CRS, namun sampai saat ini belum lagi ada tanda-tanda proses pembangunan rumah tersebut akan dibangun. Selain itu, 221 KK pengungsi asal Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, juga mengalami nasib sama yang mempertanyakan komitmen pemerintah dan BRR yang hingga kini belum lagi membangun rumah mereka. Begitu juga dengan 18 KK di Desa Ulee Titi, Dusun Lipah Tutong, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara yang juga mempertanyakan rumah bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Tidak jelasnya sistem pendistribusian rumah bantuan terjadi karena data KK yang selalu berubah sehingga tumpang tindih dalam pendistribusian bantuan. Di sejumlah desa, fenomena korban tsunami yang mendapat rumah bantuan lebih dari satu semakin banyak, dengan cara membuat kartu keluarga baru. Tumpang tindih dan kesenjangan ini tidak lain dipicu karena sistem verifikasi dan pengawasan yang buruk. Sebagai contoh, di Komplek Tenda TVRI, jumlah pengungsi selalu berubah-ubah sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengalokasikan berapa rumah bantuan yang akan dibuat. Untuk itu, pemerintah dan BRR berharap bahwa dalam memberikan data, hendaklah para koordinator tenda atau barak tidak plin-plan. Berikan apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Jangan dimanipulasi.



Rumah Bantuan Tidak Layak Huni

Namun, tidak hanya masalah distribusi rumah bantuan yang masih menjadi persoalan, tapi juga masalah rumah yang tidak layak huni juga terus bermunculan. Sebagian korban memperoleh rumah dengan kualitas bagus bertipe besar, Namun, yang lain hanya dapat rumah bantuan dengan kayu yang keropos. Kekecewaan masyarakat juga terjadi terhadap rumah yang dibangun sendiri oleh BRR Aceh-Nias, yang kualitasnya tidak memadai, seperti yang dialami oleh warga korban tsunami di Desa Kuta Geulumpang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, yang mengeluh dan kecewa terhadap rumah bantuan yang mereka tempati yang berasal dari IOM dengan bahan material yang jelek. 18 unit rumah yang mereka tempati itu terlihat sebagian rumah mulai berserbuk dan sebagian dindingnya retak-retak. Sementara dari kalangan kontraktor atau pelaksana pembangunan perumahan berdalih bahwa anggaran yang tersedia sangat minim, sehingga tidak sesuai dengan harga bahan material bangunan.

Rendahnya kualitas material/konstruksi dan minimnya fasilitas rumah korban tsunami, dalam beberapa pekan terakhir, telah menjadi sorotan. Sebagian warga juga bahkan menolak menempati rumah bantuan tersebut. Melihat masa kerja BRR yang hanya tinggal sekitar dua tahun lagi, tentu akan sulit diprediksi, apakah pembangunan rumah bagi korban tsunami ini bisa terlaksana sesuai rencana. Yang jelas tidak hanya rumah yang harus cepat terbangun, tapi juga kualitasnya harus mengacu kepada konstruksi tahan gempa dan layak huni.

BRR kini mulai menyadari kekurangan dalam pembangunan perumahan untuk para korban tsunami sehingga untuk tahun 2006/2007, BRR telah menaikkan anggaran perumahan dari sekitar Rp 49 juta/unit menjadi sekitar Rp 53 juta hingga Rp 63 juta/unit. Dengan anggaran yang lebih besar ini, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi kontraktor dalam membangun rumah dengan kualitas yang buruk. Berkaitan dengan rumah-rumah bantuan yang kualitasnya rendah dan minim, maka akan menjadi tanggungjawab BRR.

Masih ada NGO dan Kontraktor Nakal di Aceh

Sepertinya NGO-NGO nakal masih ada juga di Aceh dan juga para kontraktor nakal yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat Aceh. Hal ini terjadi di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dijanjikan oleh sebuah NGO



untuk membangun 438 unit rumah. Namun, sampai sembilan bulan pasca MoU, baru sembilan unit rumah rampung. Keterlambatan ini tidak dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat menilai NGO tidak serius dalam memberikan bantuan rumah kepada mereka. Begitu juga yang terjadi dengan masyarakat korban tsunami yang berasal dari Desa Pulo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, yang kini mayoritas masyarakatnya masih setia menetap di barak hunian sementara. Demikian juga yang terjadi di Kemukiman Calang, yang dijanjikan akan dibangun oleh Red Cross Jerman. Untuk tahap pertama akan dibangun 30 unit dan akan selesai pada akhir Bulan Juli 2006 kemarin, namun sampai akhir Agustus 2006, masih belum juga selesai sehingga membuat masyarakat cemas mengingat masa tinggal di barak hanya sekitar tiga bulan lagi. Setelah itu, kemana mereka harus tinggal?. Apakah mereka harus tinggal kembali di tenda? Padahal Program Pemerintah melalui Gubernur telah mencanangkan Penghapusan Manusia Tenda selesai pada akhir Bulan Juni yang lalu. Masyarakat berharap agar Pemerintah dan BRR bisa segera memperhatikan masalah ini.

Kesulitan Pembangunan Rumah Bantuan

Bagi sebagian NGO yang komit dalam melakukan pembangunan rumah di Aceh, kesulitan yang dirasakan adalah mendapatkan bahan bangunan dengan harga yang standar dan kualitas yang bagus. Namun, hal ini sulit didapat dikarenakan melambungannya harga bahan bangunan sehingga menyebabkan sebagian NGO tak bisa membangun rumah bantuan untuk korban tsunami sesuai dengan jumlah komitmen awal mereka. Diantaranya adalah :

No	Nama NGO	Komitment Awal	Pengurangan	Penambahan
1.	World Vision Indonesia	7700	4066	-
2.	Care International Indonesia	8000	3722	-
3.	IOM	11000	3500	-
4.	Up Link	3000	-	3750
5.	Muslim Aid	1225	-	2273
6.	Yayasan Budha Tzu Chi	3700 (tetap)	-	-



Beberapa komitmen pengurangan dari NGO ini mengakibatkan beban BRR Aceh-Nias untuk memenuhi kekurangan rumah bantuan juga membengkak. Keadaan ini juga mengharuskan BRR untuk bersiap memenuhi kekurangan rumah yang kemungkinan tak bisa dipenuhi oleh NGO. Padahal, dana BRR yang bersumber dari APBN juga terbatas. Tahun anggaran 2005 BRR mematok biaya pembangunan rumah Rp 45 juta per unit. Bahkan, dalam blue-print Bappenas plafon pembangunan rumah hanya Rp 29 juta per unit. Tetapi, ternyata terjadi pembengkakan biaya, terutama akibat kenaikan bahan bakar minyak. Saat ini, untuk pembangunan rumah BRR ke depan, mematok plafon satu unit rumah menjadi sekitar Rp 60 juta.

Namun, kita tidak bisa mengabaikan juga apa yang telah dilakukan oleh BRR walaupun masih dalam persentase yang kecil. Masalah rumah memang menjadi tugas berat BRR karena menyangkut kehidupan dasar masyarakat. Namun, kelambanan ini juga disebabkan karena proses tender untuk pelaksanaan proyek di lapangan, prosedur APBN yang menyangkut penyaluran dana, sumber daya manusia (SDM) lokal yang trampil, dan juga kendala pengadaaan bahan baku untuk material kelengkapan obyek pembangunan.

Pembangunan Rumah Tidak Lagi Sesuai Konsep Tata Ruang “BLUE-PRINT”

Jika kita membaca berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi ditas, mulai dari distribusi rumah bantuan, kesulitan pembangunan rumah, adanya NGO dan kontraktor nakal, maka semua hal ini tak terlepas dari tidak adanya perencanaan yang matang dalam konsep pembangunan perumahan Aceh pasca bencana. Salah satu konsep pembangunan rumah tentunya berkaitan dengan konsep tata ruang yang telah dibuat di Blue-Print. Cetak Biru yang menjadi acuan perencanaan kini hanya menjadi sebuah buku yang terpajang.

Idealnya, pekerjaan paling awal dalam upaya membangun kembali NAD yang telah porak poranda, adalah memetakan ulang areal yang masih tersisa. Peta yang diperlukan bukan hanya peta wilayah, namun juga peta kegempaan dan rawan tsunami. Data itu nantinya sangat berguna bagi penataan ulang ruang wilayah dan pembangunan yang ramah lingkungan dan aman terhadap bencana serupa di kemudian hari.

Hasil rekonstruksi di Aceh jika ditinjau dari segi penataan ruang, terkesan tak ada perencanaan dalam pembangunan rumah warga maupun infrastrukturnya, Hal ini bisa



kita lihat di daerah Ulee Lheu dan Lampaseh. Kita tau bahwa rekomendasi Bappenas menyatakan bahwa pembangunan perumahan kembali haruslah berjarak 400 meter dari garis pantai. Dan sebelum kawasan perumahan nelayan, harus ada sabuk hijau berupa hutan bakau dan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak menjadi korban kedua kalinya.

Pemerintah telah membuat *Blue-Print* sebagai dasar pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak gempa dan tsunami di sejumlah daerah di Propinsi NAD. Namun demikian Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dinilai telah melanggar Blue Print (Cetak Biru) pembangunan kembali pasca tsunami. Akibatnya, banyak pembangunan di Aceh yang telah menyalahi perencanaan yang telah ditetapkan dalam *Blue Print* itu. BRR tidak mematuhi blue print yang telah dibuat pemerintah dalam upaya membangun kembali daerah-daerah yang terkena tsunami, padahal blue print itu sangat penting bagi masyarakat Aceh dalam upaya menata kembali wilayah pasca tsunami.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan

Secara institusi BRR tidak akan memperpanjang masa rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD. Masa kerja BRR di NAD dan Nias terbagi menjadi dua bagian, yaitu rehabilitasi (April 2005-Desember 2006) dan rekonstruksi (Juli 2006-Desember 2009). Namun apakah kondisi ini akan terus membaik jika nantinya masa kerja BRR berakhir di tahun 2009. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pembelajaran kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai upaya memberdayakan masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Sehingga, kesan bahwa masyarakat NAD hanya bisa meminta dapat dihilangkan.

Selain itu, keberadaan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi diperlukan perhatian khusus pada ahli pembangunan wilayah. Dataran yang menghadap ke laut dalam yang memiliki zona patahan didalamnya merupakan wilayah yang rawan bencana. Ditambahkan lagi, Banda Aceh diapit oleh dua patahan yang membujur searah dengan Pulau Sumatera, dua patahan ini menjadikan Banda Aceh rawan terhadap gempa bumi dan tentunya tsunami karena pantai di Banda Aceh menghadap Laut Dalam. Selain itu, Banda Aceh juga berada pada daerah aliran Kreung Aceh yang memungkinkan sungai



besar tersebut menjadi jalur masuk air bah akibat tsunami. Keadaan topografi Kota Banda Aceh yang seperti ini, bukan hanya membuat Banda Aceh rawan terhadap bencana gempa dan tsunami, tetapi juga rawan terhadap bencana lainnya. Untuk itu perlu dibuatkan perencanaan yang multibahaya. Perencanaan kota ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai alat mitigasi atau alat yang memperkecil dampak kejadian bencana, karena tata ruang baik akan membantu mengurangi jumlah korban jika terjadi bencana pada masa yang akan datang.



BAB III ***EKONOMI***

Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berlangsung sampai saat ini. Proses tersebut dilakukan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor, seperti; perekonomian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) NAD, pertumbuhan ekonomi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) masih belum menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di NAD pada tahun 2005 dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi penurunan PDRB sebesar 13,45 persen dibanding tahun 2004 yang hanya 9,63 persen. Penurunan terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 33,57 persen, diikuti penurunan di sektor bangunan 23,96 persen. Sektor yang mengalami peningkatan itu terdiri dari sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 45,32 persen, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sebesar 12,23 persen.

Selain itu, jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang ada di Aceh tahun 2005 cenderung semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 lalu dari total penduduk Aceh sekitar 4,03 juta jiwa, jumlah penduduk miskin sebesar 2,01 juta, atau 49,87 persen. Pada tahun 2004 dengan total jumlah penduduk sebesar 4,08 juta jiwa, jumlah penduduk miskin justru lebih sedikit, yaitu sebesar 1,15 juta jiwa, atau 28,37 persen dari total penduduk. Dengan demikian, dari tahun 2004 hingga tahun 2005 terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 1,36 juta jiwa atau bertambah 53,9 persen.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam rangka membangkitkan dan memulihkan kembali perekonomian masyarakat NAD berbagai NGO baik asing maupun local mulai memberikan bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan tersebut ada berupa barang maupun modal. Di Kecamatan Lhong, Aceh Besar, Lembaga Pembinaan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aceh menyalurkan bantuan dana dalam bentuk hibah kepada delapan desa di kecamatan tersebut, dengan total nilai mencapai Rp 2,5 Milyar lebih. Dana itu diperuntukkan kepada kelompok-



kelompok usaha kecil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, seperti; usaha di sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan usaha kecil. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap karena setiap dana yang telah dikucurkan akan dimonitor bersama demi efektifitas. Jika kucuran dana dalam satu tahap terealisasi secara sempurna, maka akan ada kucuran dana selanjutnya. Selain itu, sebuah lembaga Bank Dunia yang beroperasi di Aceh, IFC (International Finance Cooperation) akan terus mendukung kemajuan para pelaku usaha di NAD. Lembaga ini yang berfungsi sebagai lembaga pengucur dana akan membantu dalam bentuk investasi modal terutama pada sektor swasta.

Sebanyak 2.301 petani korban gempa bumi dan gelombang tsunami di Kabupaten Aceh Barat, mendapat bantuan bibit, obat-obatan, dan pupuk dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Paket bantuan tersebut diberikan melalui kelompok tani untuk dikembangkannya tanaman kacang tanah, cabe, dan padi di areal yang terkena hantaman tsunami. Bantuan yang diberikan kepada 38 kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan, meliputi Meureubo, Arongan Lambalek, Samatiga, dan Bubon. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah dengan menggunakan pola bergulir. Sedangkan sistem penggarap lahan dan tanaman yang dikembangkan masing-masing kelompok tani menggunakan pola padat karya dan lokasinya tersebar 36 desa dalam empat kecamatan tersebut.

Sementara itu bantuan juga diberikan kepada masyarakat korban bencana tsunami. Namun masih ada korban bencana tsunami yang belum mendapatkan bantuan. Janda korban musibah tsunami tersebar di Kabupaten Aceh Barat mengharapakan pemerintah memberikan bantuan untuk mereka dan dari berbagai pihak lainnya. Bantuan yang diharapkan dalam bentuk modal usaha itu, karena dinilai selama ini mereka kurang mendapat perhatian dan belum tersentuh bantuan.

Laporan Keuangan APBD

Sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam penggunaan dana APBD 2005 ditemukan berbagai kelemahan. Buku kas Bendaharawan Umum Daerah yang belum ditutup, sebagai bukti kurang tertibnya manajemen keuangan, khususnya sumber dana dari APBD yang dikelola



Pemko Banda Aceh. Sementara pada sisi lain, dalam laporan tersebut menyebutkan, pengalokasian anggaran dana APBD 2005 untuk belanja modal tanah sebesar Rp 16.171.610.000 dengan realisasi 15.998.665.800.

Sementara itu, Tim Perhitungan APBD 2005 DPRD NAD dikejutkan dengan pengeluaran cek (bilyet giro) senilai Rp 39,58 miliar oleh eksekutif. Menurut Kepala Biro Keuangan, cek tersebut diterbitkan untuk membayar SPMU APBD 2004 yang belum sempat dicairkan dananya karena terjadi bencana gempa dan tsunami. SPMU dan cek bilyet giro yang belum sempat diuangkan itu baru dibayarkan kepada pihak ketiga mulai bulan Februari - April 2005. Cek yang dikeluarkan eksekutif tersebut di luar permohonan usulan izin prinsip pembayaran tunggakan APBD 2004 senilai Rp 300,15 miliar yang diajukan kepada legislatif pada tahun 2005 lalu. Untuk membayar tunggakan APBD 2004 yang belum sempat dibayar eksekutif kepada pihak ketiga akibat bencana tsunami, eksekutif mengusulkan izin prinsip pencairan dana APBD 2004 kepada legislatif senilai Rp 300,15 miliar lebih. Usulan ini diajukan pada tahun 2005, karena masih banyak proyek APBD 2004 yang belum terbayar, akibat bencana tersebut. Permohonan eksekutif itu dikabulkan legislatif.

Dana yang dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pembayaran tunggakan APBD 2004 totalnya senilai Rp 282,86 miliar, sedangkan legislatif mengizinkan senilai Rp 300,15 miliar,. Ini berarti masih terjadi sisa senilai Rp 17,28 miliar. Dana untuk pembayaran tunggakan APBD 2004 masih bersisa Rp 17,28 miliar, pihak eksekutif menerbitkan cek dalam bentuk bilyet giro senilai Rp 39,58 miliar.

Hal ini membuktikan sistem pembukuan dan pengeluaran keuangan di Pemda NAD semakin kacau, dan patut dicurigai. Kalaupun dokumen pembayaran SPMU dan cek bilyet gironya hilang akibat tsunami, tindakan yang harus dilakukan hanya penggantian SPMU dan cek bilyet giro saja, bukan harus mengeluarkan dana baru. Akibat penerbitan cek giro bilyet itu, dalam aliran kas daerah 2005 untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga jadi membengkak. Pada perhitungan sebelumnya pada neraca daerah tertulis cuma senilai Rp 519,86 miliar, tapi dalam aliran kas tertulis menjadi Rp 542,16 miliar. Hal tersebut untuk penyaluran dana migas ke 21 kabupaten/kota Rp 219,71 miliar, dan membayar tunggakan APBD 2004 kepada pihak ketiga menjadi Rp 322,45 miliar, tidak



lagi senilai Rp 300,015 miliar sebagaimana yang pernah diusulkan eksekutif kepada legislatif.

Hal ini berarti verifikasi nilai tunggakan APBD 2004 yang diusul eksekutif senilai Rp 300,015 miliar tahun lalu kepada legislatif untuk diberikan izin prinsip guna membayar tunggakan APBD 2004 kepada pihak ketiga tidak dilakukan dengan teliti, karena masih ada yang tertinggal.

Kelangkaan Minyak Tanah

Terhitung sejak awal Maret 2006 lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru tentang pengurangan jatah minyak tanah bersubsidi. Jatah minyak tanah bagi masyarakat Aceh telah dikurangi dari 568 ton menjadi 518,5 ton (kiloliter) per hari. Pengurangan itu bukan hanya terjadi di Propinsi NAD, tetapi juga terhadap daerah lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk menutupi subsidi minyak. Secara nasional pengurangan jatah minyak berkisar 15 persen.

Berdasarkan ketentuan Bappenas jumlah kebutuhan minyak tanah sebesar 3,75 liter per jiwa per bulan, artinya jika penduduk Aceh saat ini diperkirakan berjumlah 4,2 juta jiwa, maka kebutuhan minyak tanah per bulan adalah 15.750.000 liter atau 525.000 jiwa (525 ton) per hari. Dari ketentuan ini, seharusnya Pertamina memasok minyak tanah sebesar 525 ton/hari untuk NAD.

Kenaikan permintaan minyak tanah dewasa ini disebabkan pola konsumsi masyarakat yang berubah. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan gas elpiji beralih memakai minyak tanah karena tidak mampu membeli gas elpiji untuk kebutuhan memasak sehingga kebutuhan akan minyak tanah secara nasional meningkat. Selain itu, minyak tanah bersubsidi banyak digunakan oleh industri-industri akibat mahalnya minyak tanah non subsidi.

Pemerintah Propinsi NAD pernah mengajukan penambahan quota minyak tanah bersubsidi. Namun permintaan tersebut ditolak Pertamina. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi quota minyak tanah bersubsidi setiap tahun bagi seluruh daerah di Indonesia..



Permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah di Aceh selama enam bulan ini terkait dengan lambannya pengawasan dari Pemerintah Propinsi NAD. Pemerintah tidak tanggap dengan permasalahan kelangkaan minyak tanah yang telah berlangsung lama. Selain itu, pihak Pemda NAD tidak memiliki data-data jumlah minyak tanah bersubsidi yang telah di salurkan oleh Pertamina. Seharusnya pihak Pemda NAD melalui Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantaun Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT) BPM Prov NAD dapat melakukan pengawasan mulai dari awal kenaikan harga BBM. Pemda harus mengawasi agar hanya rakyat yang kurang mampu saja yang boleh membeli minyak tanah bersubsidi, sedangkan yang tergolong mampu diarahkan untuk menggunakan LPG. Sementara nelayan dan industri tidak boleh lagi membeli minyak tanah bersubsidi untuk usaha mereka

Pemerintah NAD baru merespon pembentukan tim pengawas ketika permintaan tambahan quota minyak tanah ditolak. Pemerintah Daerah Provinsi NAD telah membentuk tim yang anggotanya terdiri staf dari Bidang Ekonomi Setda NAD untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang masih terjadi di daerah ini. Tim yang telah diberangkatkan ke pantai barat, selatan dan timur tersebut nantinya diharapkan ada satu data yang disampaikan berkaitan dengan kondisi lapangan.



BAB IV ***PENDIDIKAN***

Sudah 20 bulan bencana gempa dan tsunami berlalu. Namun hingga kini masalah di sektor pendidikan belum juga dapat diselesaikan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya masalah yang dihadapi baik masalah sarana dan prasarana pendidikan hingga aksi demo yang dilakukan baik oleh mahasiswa bahkan para tenaga pengajar.

Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Ironis memang ditengah begitu banyaknya bantuan yang mengalir, hingga kini pemandangan sekolah-sekolah yang melakukan proses belajar mengajarnya dalam tenda, menumpang di sekolah yang lain bahkan ada yang menumpang di rumah warga masyarakat masih tetap terlihat. Hal semacam ini masih dapat dilihat di Kabupaten Simeulu. Akibat bencana gempa susulan pada tanggal 28 Maret 2005 yang meluluhlantakkan daerah yang memiliki jumlah penduduk 82.000 jiwa ini menyebabkan 156 gedung sekolah rubuh di delapan kecamatan yang ada di Simeulue sehingga 12.000 siswa kehilangan tempat belajar, dan kini baru sekitar 3.000 yang sudah tertampung. Jadi ada sekitar 9.000 siswa yang masih belajar dalam tenda-tenda darurat. Kondisi tenda yang jorok, kotor, bocor membuat suasana belajar menjadi sangat tidak nyaman dan kian bertambah menyedihkan lagi ketika tenda yang digunakan sebagai tempat belajar tersebut berubah fungsi pada malam harinya sebagai kandang kerbau sehingga pada saat anak-anak belajar terpaksa menghirup udara yang sangat tidak sehat tersebut.

Menyedihkan sekali melihat kondisi seperti ini. Kawasan ini merupakan kawasan yang sedikit luput dari perhatian pemerintah dan BRR. Ditambah lagi daerah ini jarang dikunjungi para pejabat karena kondisi infrastrukturnya yang masih sangat sulit untuk dijangkau. Kita tentu sangat berharap ada sikap tanggap dari pemerintah, pejabat setempat maupun BRR agar masalah ini tidak terus terjadi. Mengingat begitu besar jumlah siswa yang harus bersusah payah agar bisa menikmati ilmu yang menjadi bekal hidupnya kelak.



Pihak Dinas Pendidikan yang lebih memfokuskan pembangunan pada gedung sekolah yang hancur total belum bisa berbuat banyak untuk gedung yang mengalami rusak berat atau ringan. Sikap ini memang tidak salah karena memang lebih diprioritaskan sekolah yang hancur total. Akan tetapi bila melihat kondisi di lapangan dengan berbagai macam kendala dan hambatan sehingga belum tentu gedung yang akan dibangun tersebut akan selesai tepat waktu. Jadi tidak ada salahnya bagi dinas terkait memberikan kemudahan bagi para donatur yang ingin membantu membangun gedung sekolah yang rusak ringan maupun berat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan.

Aksi Mahasiswa

Pendidikan memang mahal. Akan tetapi hal ini bukan suatu acuan bagi pihak rektorat melalui SK No. 306/2006 tertanggal 27 Juli 2006 untuk menaikkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 35% untuk tahun ini. Sikap rektorat yang sepihak dan terkesan sembunyi-sembunyi inilah yang menimbulkan aksi demo dari kalangan mahasiswa. Tambahan dana bagi mahasiswa yang tidak selesai dalam waktu 10 semester ini sungguh sangat memberatkan mahasiswa. Apalagi kondisi perekonomian masyarakat Aceh yang belum pulih benar pasca konflik dan tsunami. Bukan keinginan mahasiswa untuk menempuh pendidikan terlalu lama. Dan bukan keinginan mereka pula untuk menjadi mahasiswa abadi di Unsyiah. Namun kondisi yang memaksa mereka untuk menunda hingga 10 semester bahkan lebih. Contoh konkrit ini bisa kita lihat di Fakultas Teknik, Unsyiah. Sistem kurikulum yang terlalu rumit, ditambah lagi sikap para dosen yang menjadikan jadwal mengajarnya bukan suatu hal yang penting. Para dosen lupa “proyek” utamanya adalah mentransfer ilmu yang pernah diperoleh kepada para mahasiswanya. Namun yang terjadi mereka lebih tergiur pada proyek-proyek lain. Akibatnya para dosen terlalu sibuk diluar kampus dan efeknya kembali pada para mahasiswa terutama yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi karena sulitnya untuk bisa bertemu dengan dosen pembimbing mereka.

Bukankah lebih baik bila hal ini yang diperhatikan oleh pihak rektorat. Mereka membuat suatu peraturan tertulis yang mengharuskan tenaga dosen lebih fokus ke kampus. Memang tidak salah bila mereka lebih tertarik pada proyek diluar kampus



karena negara kita kurang menghargai jasa para guru. Untuk guru besar saja gajinya kurang lebih Rp. 2,5 juta. Hingga tak heran bila guru besar dijuluki GBHN (Guru Besar Hanya Nama). Namun bukan berarti hal ini “menghalalkan” mereka melupakan tanggung jawabnya sehingga memaksa rektorat mengeluarkan keputusan yang lagi-lagi merugikan mahasiswa. Jadi dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik agar slogan kampus Unsyiah sebagai “*Jantung Hatee Rakyat Aceh*” akan tetap utuh hingga ke depan dan nantinya mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang bisa menyemai keberhasilan di bumi Aceh.

Aksi Dewan Guru

Financial bukan masalah yang gampang untuk era saat ini. Mengingat semua harga yang kian melambung tinggi. Sehingga tidak heran begitu banyak aksi-aksi demo yang dilakukan dengan berbagai tuntutan. Apalagi bila masalah financial tersebut dipicu oleh sikap ketidakadilan dari pemerintah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Seluruh guru madrasah di daerah tersebut melancarkan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap tidak dipenuhinya tuntutan mereka atas dana kesejahteraan pada Pemkab setempat. Akibat aksi tersebut proses belajar dan mengajar (PBM) di seluruh Aceh Barat terhenti total. Meski telah mendapat kecaman keras dari kalangan wali murid namun para guru madrasah tersebut tetap saja melancarkan aksinya.

Sungguh sangat disesalkan sikap yang ditempuh para guru madrasah tersebut. Karena tindakan ini dinilai telah menyalahi kode etik guru dan sekaligus pembodohan terhadap bangsa dan negara. Namun kita tidak dapat menyalahkan mereka sepenuhnya karena aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan para guru, yang telah berlangsung sejak Juni 2006. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kakanwil Depag) NAD, Ghazali Mohd Syam menyebutkan para guru di lingkup Depag Aceh Barat, menuntut kepada pihak Pemkab setempat untuk menganggarkan dana kesejahteraan kepada mereka, sebagaimana yang diberikan kepada para guru yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Aceh Barat. Akan tetapi tuntutan tersebut tidak diindahkan sehingga para guru tersebut beranggapan bahwa Pemkab Aceh Barat telah berlaku tidak adil. Sikap Pemkab Aceh Barat ini juga sangat disesalkan oleh panitia anggaran DPRD NAD dan Komisi E. Karena menurut Surya Darma salah seorang anggota dewan,



memang diperbolehkan Pemkab memberikan dana tunjangan bagi para guru yang bernaung dibawah Depag didasarkan atas surat edaran mendagri bernomor 903/210/BAKD, yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Daeng M Nazier. Surat edaran tertanggal 27 Pebruari 2006, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Ketua DPRD, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada alasan bagi Pemkab Aceh Barat untuk tidak mengeluarkan dana tunjangan tersebut karena hal ini tidak melanggar aturan yang berlaku.



BAB V ***KESEHATAN***

Seiring dengan berjalannya waktu, persoalan ekonomi yang menghimpit negeri ini, masih terus saja terjadi. Selain faktor sulitnya perekonomian, cuaca yang tidak menentu baik banjir maupun kekeringan juga merupakan permasalahan yang sangat serius saat ini, dan diperlukan penanganan dengan segera. Karena apabila berlarut-larut, ini akan berdampak pada anak-anak Indonesia umumnya dan Nanggroe Aceh Darussalam khususnya.

Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan momok (hantu) yang dapat menahan kepintaran anak-anak (IQ). Kasus gizi buruk (*marasmus kwarsiorkor*) ini dengan cepat merajalela. Bukan hanya di Aceh, provinsi lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama, seperti Bogor, Yogyakarta, Jakarta Timur dan daerah lainnya. Di Bogor, tercatat sebanyak 240 anak yang menderita gizi buruk, di Yogyakarta tercatat 1.506 balita dan di wilayah Jakarta Timur tercatat sebanyak 10.987 balita yang terindikasi kekurangan gizi.

Sungguh angka yang sangat mengejutkan, begitu banyaknya kasus gizi buruk terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi bukan sim salabim tapi merupakan akumulasi dari beberapa tahun dan pada tahun 2005 dan 2006 lah, kasus ini mencuat. Di Aceh sendiri, kasus gizi buruk sampai dengan Agustus 2006 tercatat sebanyak 1.336 kasus; 29 kasus diantaranya meninggal dunia. Sedangkan 1.030 kasus kondisinya telah membaik dan 177 kasus masih perlu penanganan sampai tuntas.

Kebanyakan ahli-ahli berpendapat bahwa perkembangan kejiwaan anak dimulai dari lahir sampai usia tujuh tahun. Usia ini yang menentukan kehidupan anak ini kelak dalam menggunakan akal sehatnya. Bagus atau tidaknya perkembangan kejiwaan anak ditentukan oleh cukupnya triptopan (asam amino) yang diperlukan oleh otak anak-anak sehingga kincir-kincir otak dapat memegang peranan penting dalam proses berpikir. Jika triptopan ini kurang maka akan menyebabkan otak anak-anak yang terkena gizi buruk tidak dapat lagi memutar akal sehatnya. Jika Pemerintah tidak bertindak cepat, bukan



tidak mungkin nantinya dikhawatirkan akan terjadinya “*The lost generation*” di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya.

Badan WHO pun memperkirakan, sebanyak 3 juta dari Balita di Indonesia kekurangan asam amino triptopan. Adalah merupakan tugas yang terberat bagi Pemerintah kita agar dapat mempertahankan generasi-generasi penerus Indonesia yang saat ini membutuhkan pertolongan dan penanganan dengan segera. Padahal, kekurangan akan triptopan /asam amino ini sangat *simple* untuk ditangani, karena asam amino terdapat pada beras. Oleh karena itu, yang terpenting saat ini adalah peningkatan pangan harus lebih diprioritaskan. Tentunya kita tidak ingin anak-anak di Indonesia ini nantinya bernasib sama dengan anak-anak yang ada di negara Ethiopia.

Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan

Pasca tsunami, begitu banyak keluhan-keluhan yang terlontar dari warga masyarakat khususnya keluhan mengenai lambannya pembangunan pusat pelayanan kesehatan di beberapa daerah yang terbilang cukup parah terkena imbas tsunami.

Tetapi kebalikan dari hal di atas, tidak jarang pula kita mendengar bahwa ternyata masih banyak pusat pelayanan kesehatan yang justru telah rampung dalam hal pembangunan gedungnya, malah dibiarkan terbengkalai begitu saja dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Fenomena ini dapat kita jumpai di sebuah Poliklinik Desa (Polindes) yang pembangunannya dipusatkan di Desa Beuringen, Kabupaten Aceh Utara. Polindes ini merupakan bantuan dari salah satu NGO yang menangani masalah rehab dan rekonstruksi di Aceh saat ini, yaitu *International Rescue Comitte (IRC)* yang bekerjasama dengan NGO Cardi.

Tentu saja, hal ini membuat rasa kekecewaan yang mendalam bagi pihak IRC, yang sudah membangun pusat pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Karena awalnya, Polindes ini dibangun dengan tujuan dapat membantu warga yang terkena musibah tsunami, dan juga membantu warga penduduk daerah setempat. Bayangkan saja, Polindes yang seharusnya dapat dijadikan sebagai tempat untuk melayani kesehatan warga, malah beralih fungsi menjadi kandang karena hanya ternak saja yang berkunjung ke Polindes tersebut. Otomatis, pemandangan tak sedap menghiasi kunjungan ternak tersebut.



Tidak hanya di Desa Beuringen, pemandangan seperti ini juga bisa dijumpai di Desa Matang Jelikat, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di Desa Matang ini juga terlihat tidak terurus sama sekali. Padahal pembangunan gedung Pustu ini sudah lama diselesaikan. Namun, sampai saat ini belum dapat difungsikan dengan sebagaimana mestinya.

Hal ini terdengar sangat ironi, dikarenakan warga Desa Jelikat selama ini jika ingin berobat, harus susah payah ke Seunuddon yang terbilang cukup jauh jaraknya dari desa mereka, sementara Pustu mereka belum dapat difungsikan. Ini jelas membuktikan, bahwa pusat pelayanan kesehatan yang ada, sebenarnya memang sangat dibutuhkan bagi warga setempat. Namun, tenaga medisnya saja yang belum ada.

Sebenarnya, apa yang menyebabkan pusat pelayanan kesehatan yang telah ada tidak dapat difungsikan dengan baik?. Apakah dokter dan sejumlah para medis kita enggan untuk ditempatkan di desa-desa yang terpencil?. Hal ini perlu dipertanyakan, karena apabila hal itu terjadi berarti dokter dan para medis kita belum mengerti sepenuhnya hakekat tugas mulia dan misi kemanusiaan seorang pelayan kesehatan. Hendaknya para dokter dan para medis dapat memahami benar-benar tentang sumpah para dokter dan para medis. Para medis perlu mempunyai motto *"Jikalau bumi berguncang, langit runtuh, tugas seorang dokter dan para medis adalah harus tetap mengobati pasien"*. Maka wajar jika kasus seperti di Desa Beuringen dan Jelikat terjadi, maka perlu adanya pengalihan fungsi dokter. Apabila dokter manusia memang enggan untuk ditugaskan di daerah terpencil, biarlah Polindes dan Pustu yang telah dibangun tersebut, dijadikan sebagai *"klinik hewan"*, dengan menempatkan sejumlah dokter hewan. Karena selama ini hanya ternak saja yang acap kali berkunjung ke sana.

Angka Kematian Ibu dan Anak

Meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Bayi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam membuat kita prihatin. Penjabat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Mustafa Abubakar menyatakan rasa prihatin terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang sangat rendah, yang akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Beliau juga menyampaikan agar jajaran kesehatan dan instansi



terkait harus saling bekerja keras untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat sehingga nantinya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi di NAD.

Data yang diterima, menyebutkan bahwa saat ini di NAD angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 307/100.000 dari ibu yang melahirkan dan kematian bayi sekitar 35/1.000 dari kelahiran hidup. Sementara data yang diperoleh dari pihak Dinas Kesehatan beberapa waktu yang lalu menyebutkan, bahwa di tahun 2005 terdapat sebanyak 373 jiwa angka kematian ibu, dan sebanyak 32 jiwa angka kematian bayi.

Pemerintah dan Dinas Kesehatan, berusaha mengupayakan dan menargetkan akan menekan angka kematian ibu di tahun 2009 ke depan, sehingga turun mencapai sebanyak 226 jiwa, dan angka kematian bayi turun hingga mencapai sebanyak 26 jiwa. Hal ini sepertinya belum dapat dicapai dengan sepenuhnya, bahkan masih jauh dari target, dan bisa dikatakan angka ini masih terlalu tinggi.

Tingginya angka kematian ibu dan bayi saat ini, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya; pelayanan kesehatan yang diakui masih buruk dan belum maksimal serta kontrol ibu-ibu hamil yang tidak teratur. Selain itu, pemahaman informasi Keluarga Berencana (KB) dan makna keluarga sejahtera belum dapat dijangkau pada semua lapisan masyarakat, termasuk di kalangan pasangan usia subur (PUS).

Menurut gubernur, fenomena lain yang memicu tingginya angka kematian ibu dan balita di NAD saat ini, juga dikarenakan ruang lingkup keluarga dan masyarakat yang belum seluruhnya mampu dicegah, seperti konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap anak-anak dan perempuan.

Selain itu, yang cukup memprihatinkan adalah mata pencaharian kesehari-harian dari seorang ibu yang terkadang cukup berat dan dapat membahayakan janin si ibu, seperti; mencari kayu bakar ke hutan dan menjadi tukang cuci. Sehingga si ibu akan mudah mengalami keguguran. Kesulitan ekonomi yang mengharuskan para ibu yang sedang hamil muda untuk ikut bekerja membantu suami, memang sangat sulit sekali untuk dicegah karena berkaitan dengan kondisi finansial.

Tetapi, hendaknya kader-kader kesehatan kita melalui Posyandu atau Klinik-klinik kesehatan dapat mensiasatinya dengan memberikan pengertian dan sosialisasi kepada sejumlah ibu-ibu yang hamil muda. Memberikan arahan, terhadap apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, serta menyarankan agar sang ibu rajin



mengontrol kandungannya kepada bidan, atau klinik terdekat serta mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat. Dengan begitu, akan mempermudah menekan lajunya angka kematian ibu dan bayi di NAD nantinya.

Perlunya Pengetahuan Kesehatan bagi Masyarakat

Ilmu Kesehatan adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hidup sehat. Ilmu kesehatan memberikan pengertian-pengertian apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang sedemikian rupa, agar mereka dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Pendidikan Ilmu Kesehatan ditujukan terutama kepada orang-orang yang sehat, mereka yang keadaannya masih sehat dijaga agar tetap sehat. Ini merupakan preventif sifatnya. Jadi bukan ematif atau mengobati orang yang sakit untuk menjadi sembuh, akan tetapi mencegah tumbuhnya penyakit agar orang-orang yang keadaannya masih sehat tetap dalam keadaan sehat. Ilmu kesehatan mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap diri sendiri atau perorangan maupun untuk masyarakat. Untuk itu, orang harus mengerti cara-cara melakukan hidup sehat, yang dapat dimulai dari lingkungan yang paling dini yakni pada lingkungan perorangan/pribadi, yang kemudian disusul dengan lingkungan sosial/masyarakat.

Tetapi, pada dasarnya Pendidikan Ilmu Kesehatan ini masih sangat sulit untuk diterapkan pada masyarakat, apalagi khususnya penduduk yang tinggal di daerah terpencil. Mereka bahkan tidak pernah mempedulikan sama sekali dampak yang timbul, apabila mereka tidak menjaga kesehatan diri dan lingkungan mereka. Hal ini terbukti dari kejadian yang baru-baru saja terjadi, tepatnya di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 22 warga terserang wabah diare. Dan salah satunya tidak dapat diselamatkan, hingga harus menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan 21 warga lainnya terpaksa harus dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Usut punya usut, wabah yang terlihat sepele tapi cukup mengerikan dan mematikan ini bisa menyebar luas, dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat setempat dalam hal menjaga kesehatan baik makanan maupun minuman. Hal ini terungkap setelah pihak Dinas Kesehatan Aceh Tengah setempat mencari sebab apa yang menjadi mudahnya wabah ini cepat menjalar di empat perkampungan ini. Pihak Dinas Kesehatan memperkirakan wabah ini terjadi akibat kebiasaan dari warga mengkonsumsi



air mentah yang langsung berasal dari pegunungan. Selain akibat dari perubahan musim yang secara drastis dari musim dingin ke musim panas, wabah ini juga dengan leluasa menyerang disebabkan oleh kebiasaan buruk dari warga setempat yang masih mengkonsumsi air tidak dimasak (mentah), sedangkan sumber air sudah terkontaminasi dengan bakteri diare seperti bakteri E-Coli. Selain dua faktor tersebut, faktor belum tersedianya fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) juga menjadi pemicu timbulnya wabah diare ini. Kebanyakan warga yang menempati daerah terpencil, rata-rata belum dilengkapi dengan fasilitas MCK yang baik. Sehingga, mereka masih banyak yang membuang hajat di sembarang tempat atau “di bawah pohon rindang” (DPR) dan juga di sungai-sungai.

Lucunya, pihak Dinas Kesehatan Aceh Tengah, mengkategorikan kasus diare ini ke dalam kasus yang masih tergolong biasa. Padahal diketahui telah ada 1 warga yang meninggal akibat diare ini. Tetapi, bupati setempat berkata lain, dan mengkategorikan kasus ini menjadi kasus “Kejadian Luar Biasa” (KLB). Dari sini bisa dibayangkan, mungkin, kasus yang dianggap masuk ke dalam Kejadian Luar Biasa ala Dinas Kesehatan, mungkin apabila ke – 22 warga yang terserang wabah diare tersebut tidak dapat tertolong lagi. Padahal, dari sekarang pihak Dinas Kesehatan sudah seharusnya waspada dan berjaga-jaga. Satu korban merupakan pelajaran bagi kita, agar ke depannya tidak terjadi lagi korban berikutnya. Adalah juga merupakan tanggung jawab dari pihak Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana menerapkan sistem pola hidup sehat yang seutuhnya.